



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 07 /KMA/SK/I/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON
HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI TAHAP KE XIX DAN XX TAHUN 2023**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib pelaksanaan seleksi calon Hakim Ad Hoc pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri tahap ke XIX dan XX Tahun 2023 perlu dibentuk panitia pelaksana seleksi Calon Hakim Ad Hoc pengadilan tindak pidana korupsi;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tahap Ke XIX dan XX Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA

SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN
NEGERI TAHAP KE XIX DAN XX TAHUN 2023.

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tahap ke XIX dan XX Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tahap Ke XIX dan XX Tahun 2023 bertugas melaksanakan seleksi calon Hakim Ad Hoc pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, menyusun naskah ujian, memeriksa dan menentukan kelulusan bagi calon Hakim Ad Hoc pengadilan tindak pidana korupsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, panitia pelaksana dibantu oleh sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia pelaksana bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap Ke XIX dan XX Tahun 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Januari 2023


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI
3. Panitera Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 07 /KMA/SK/I/2023
TANGGAL : 16 Januari 2023

PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC
PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI TAHAP KE XIX DAN XX TAHUN 2023

I. Kelompok Kerja Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi

a. Penyusun Naskah Ujian, Memeriksa dan Menentukan Kelulusan.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.	Ketua Mahkamah Agung	Pelindung
2	Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial		Penasihat
3	Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.	Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung	Ketua
4	Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.	Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung	Sekretaris I
5	Dr. Yanto, SH., MH.	Panitera Muda Perkara Pidana Mahkamah Agung	Sekretaris II
6	Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.	Hakim Agung pada Mahkamah Agung	Anggota
7	Dr. Desnayeti M, S.H., M.Hum.	Hakim Agung pada Mahkamah Agung	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
8	H. Suharto, S.H., M.Hum.	Hakim Agung pada Mahkamah Agung	Anggota
9	Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H	Praktisi Hukum	Anggota
10	Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.	Akademisi	Anggota
11	Dr. Djoko Sarwoko, S.H., M.H.	Praktisi Hukum	Anggota
12	Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.	Praktisi Hukum	Anggota
13	Dr. Ramelan, S.H., M.H.	Tokoh Masyarakat	Anggota
14	Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Panitera Mahkamah Agung	Anggota
15	Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.	Praktisi Hukum	Anggota
16	Gandjar Laksmana Bonaprpta, S.H., M.H.	Akademisi	Anggota

Tugas:

1. menyusun soal-soal ujian tertulis seleksi calon Hakim Ad Hoc pengadilan tindak pidana korupsi;
2. mengoreksi jawaban hasil ujian tertulis seleksi calon Hakim Ad Hoc pengadilan tindak pidana korupsi;

3. melaksanakan tes wawancara/tes lisan bagi peserta yang telah lulus ujian tertulis; dan
4. menentukan kelulusan peserta calon Hakim Ad Hoc pengadilan tindak pidana korupsi.

b. Penyelenggara dan Pengawas Ujian Tertulis.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.	Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung	Ketua
2	Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.	Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung	Sekretaris
3	Prof. Dr. Hasbi, S.H., M.H.	Sekretaris Mahkamah Agung	Anggota
4	Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung	Anggota
5	Drs. Wahyudin, M.Si.	Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung	Anggota
6	Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung	Anggota
7	Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.	Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung	Anggota
8	H. Sahwan, S.H., M.H.	Kepala Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
9	Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.	Panitera Muda Kamar/Askor Kamar Pidana Kepaniteraan Mahkamah Agung	Anggota
10	Arman Surya Putra, S.H., M.H.	Asisten Kamar Pidana/ Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung	Anggota
11	Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.	Asisten Kamar Pidana/ Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung	Anggota
12	Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.	Asisten Kamar Pidana/ Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung	Anggota
13	Dwi Sugiarto, S.H., M.H.	Asisten Kamar Pidana/ Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung	Anggota

Tugas:

1. membawa soal ujian tertulis dan kelengkapannya ke daerah (pengadilan tinggi yang bersangkutan);
2. menyelenggarakan dan mengawasi ujian tertulis di pengadilan tinggi; dan
3. membawa kembali soal ujian dan lembar jawaban untuk diserahkan pada pemeriksa ujian di Mahkamah Agung.

II. Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1	Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.	Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung	Ketua
2	Syamsul Arief, S.H., M.H.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung	Sekretaris
3	Prof. Dr. Hasbi, S.H., M.H.	Sekretaris Mahkamah Agung	Anggota
4	Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Panitera Mahkamah Agung	Anggota
5	H. Bambang Myanto, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung	Anggota
6	Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung	Anggota
7	Sugiyanto, S.H.	Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung	Anggota
8	Dr. H. Iyus Suryana, S.H., M.H.	Sekretaris Panitera Mahkamah Agung	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
9	Edi Yulianto, S.H., M.H.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung	Anggota
10	Zahlisa Vitalita, SH., M.H.	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Anggota

Tugas :

1. menyusun kurikulum pendidikan calon Hakim Ad Hoc pengadilan tindak pidana korupsi;
2. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi calon Hakim Ad Hoc pengadilan tindak pidana korupsi; dan
3. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan calon Hakim Ad Hoc pengadilan tindak pidana korupsi.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 07 /KMA/SK/I/2023
TANGGAL : 16 Januari 2023

SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.	Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung	Ketua
2.	M.E.R. Herki Artani Richmiani, S.H., MH.	Sekretariat (Unsur Masyarakat)	Sekretaris
3.	Asep Nursobah, S.Ag. M.H.	Hakim Yustisial/Koordinator Manajemen Perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung	Anggota
4.	Romy Permana, S.H., M.H.	Kasubdit Mutasi Hakim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung	Anggota
5.	Irwansyah, S.H., M.H.	Kepala Bagian Mutasi II Biro Kepegawaian BUA MA-RI	Anggota
6.	Irwan Rosady, S.H.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI	Anggota
7.	Eko Nugroho, S.H., M.H.	Pranata Peradilan Ahli Madya Kepaniteraan Mahkamah Agung	Anggota
8.	Septin Sri Noni, S.E.	Kasi Tata Naskah Badan Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung	Anggota
9.	Hannan Tauqiefie, S.T.	Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai II A Biro Kepegawaian BUA MA-RI	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
10.	Indra Sandakila, S.T.	Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai II Biro Kepegawaian BUA MA-RI	Anggota
11.	Kartika Sandi Taurus, S.I.Pust.	Kepala Sub Bagian Penerbitan Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI	Anggota
12.	Teuku Syamsul Ramadan, S.Kom., M.MSI.	Pranata Peradilan Ahli Muda Kepaniteraan Mahkamah Agung	Anggota
13.	Prayoga Nurjaya, S.Kom., M.H.	Pranata Peradilan Ahli Muda Kepaniteraan Mahkamah Agung	Anggota
14.	Yuni Hayati Putri, S.H.	Pustakawan Muda Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI	Anggota
15.	Dwi Listiani, S.I.Pust.	Pustakawan Muda Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI	Anggota
16.	Rizqi Hendrawan, S.Kom.	Analisis Kepegawaian Pertama Biro Kepegawaian BUA MA-RI	Anggota
17.	Fachrival Marchelleoka, S.E.	Analisis Pengembangan SDM Aparatur Biro Kepegawaian BUA MA-RI	Anggota
18.	Eko Agung Subekti, S.H.	Pengelola Keuangan Biro Kepegawaian BUA MA-RI	Anggota


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
MUHAMMAD SYARIFUDDIN